

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- C.S.T Kansil, Christine S.T, 2001, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ernawati Wardiah, 2017, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bmedia imprint Kawan Pustaka, Jakarta Selatan
- H.M Fauzan, Ahmad Kamil, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengankatan Anak di Indonesia*, PT Raja GrafindoPersada
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Philipus. M.Hadjon, Bagir Manan, 1993, *Pengantar Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Ridwan H.R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Siska Lis Sulistiani, 2015, *Kedudukan Hukum Anak*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Vilta Biljana Bernadethe, Yana Suryana, 2018, *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*, Budi Utama, Yogyakarta..
- W. Riawan Tjandra, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Jurnal, Skripsi, Disertasi

- Akbar Maulana, *Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Masalah Pengemis dan Gelandangan di Kabupaten Jember*, Haebra Publisher, 2021
- Anna Syahra dan Mulati, *Aspek Hukum Tangung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Terlantar Ditinjau Dari Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Hukum Adigama, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2018.
- Baktiawan Nusanto, Toni, *Upaya Pemerintah Kabupaten Jember dalam Menanggulangi Anak Jalanan*, Jurnal Politico Vol 16 No 2 (2016)

- Darmini Roza dan Laurensius Arliman S, *Peran Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Kota Layak Anak di Indonesia*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 1, 25 Januari 2018.
- Darmini Roza dan Laurensius Arliman S, *Peran Pemerintah Daerah di Dalam Melindungi Hak Anak di Indonesia*, Masalah - Masalah Hukum, Jilid 47 No. 1, Januari 2018
- Hoirun Nisah dan Hamam, *Implementasi Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 Tentang Perlindungan Anak Terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Jember*, Rechtenstudent Journal, Volume 2 Nomor 2, Agustus 2021.
- Jihan Thania, Said Aneke dan Alfreds J, *Tanggung jawab negara terhadap hak konstitusional anak terlantar di Indonesia*, Lex Privatum, Vol. IX, No. 4, April 2021.
- Khoirunnisa, Edith Ratna dan Irawati, *Perlindungan Hukum anak terlantar atas hak anak mendapatkan jaminan kesehatan*, Notarius, Volume 13 Nomor 2, 2020.
- Lu'lu'ul Mukarromah, Emmilia Rusdiana, *Implementasi Kewenangan Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Anak Terlantar Atas Pendidikan Di Kabupaten Gresik*, Universitas Negeri Surabaya.
- Nindyana Rikha Awalia, *Strategi Survival Anak Terlantar di Kota Surabaya*, Jurnal S1 Sosiologi Universitas Airlangga
- Prisilia Ester Memah, *Perlindungan Hukum terhadap anak terlantar berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014*, Lex Et Societatis, Vol. VII No. 11, November 2019.
- Risdiana Chandra Dhewy, *Analisis Korespondensi pada Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Jawa Timur 2016*, Jurnal Edukasi, Volume 3 No.2, Oktober 2017
- Sane'a Isna Fitria Agustina, *Peran dinas sosial dan tenaga kerja Kabupaten Sidoarjo dalam pemberdayaan anak jalanan*, Vol. 2, No. 1, Maret 2014.
- Vita Rachmawati dan Dodi Faedlulloh, *Dinamika Pelaksanaan Kebijakan Proram Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan*, Journal of Political Issues, Volume 2, Nomor 2, Januari 2021

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember.

Situs Internet

<https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/16/2044/penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-2017.html>
diakses Pada 17 Juni 2022

